

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri minyak dan gas bumi lepas pantai *Offshore* merupakan salah satu sektor yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi dalam operasi, terutama dalam hal mobilisasi personel. Aktivitas di wilayah laut yang jauh dari daratan menuntut keberadaan armada pendukung yang cepat, aman, dan efisien. Salah satu moda transportasi yang memegang peranan krusial dalam rantai logistik *Offshore* adalah *crew boat*, yaitu kapal cepat khusus yang berfungsi mengangkut tenaga kerja dan peralatan ringan dari pelabuhan menuju platform pengeboran atau fasilitas produksi *Offshore*. Ketepatan jadwal operasional *crew boat* menjadi faktor strategis karena secara langsung memengaruhi kesinambungan kegiatan eksplorasi dan produksi migas. Ketika alur transportasi personel terganggu, maka potensi keterlambatan pekerjaan, gangguan produktivitas, hingga risiko keselamatan dapat terjadi (Moses & Moeis, 2023)

PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk (ELPI) merupakan salah satu perusahaan pelayaran nasional yang berperan besar dalam mendukung operasional *Offshore*, khususnya di wilayah kerja Pertamina Hulu Mahakam (PHM). Salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan operasional kapal adalah pelaksanaan *crew change*, yaitu proses pergantian awak kapal secara berkala sesuai masa kontrak kerja. Berdasarkan ketentuan *Maritime Labour Convention (MLC)* 2006, pelaut berhak memperoleh periode kerja dan istirahat yang seimbang untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Dengan demikian, keberhasilan *crew change* bukan sekadar kewajiban administratif perusahaan, namun berkaitan langsung.

dengan aspek keselamatan kerja, efisiensi operasional, serta pemenuhan hak tenaga kerja maritim (Anugerah, 2020).

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan *crew change* belum selalu berjalan ideal. Berdasarkan hasil observasi selama praktik darat di PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk Cabang Senipah, ditemukan bahwa keterlambatan pergantian awak kapal masih sering terjadi, terutama akibat hambatan administratif dan teknis seperti keterlambatan pemeriksaan kesehatan (MCU) dan penerbitan *Medical Pass* (Medpass). *Medpass* merupakan surat keterangan kesehatan yang wajib dimiliki pelaut sebelum bertugas dan berlaku sebagai jaminan bahwa pelaut berada dalam kondisi *fit for duty*. Ketika proses penerbitan *Medpass* tertunda, pelaut tidak dapat diberangkatkan sesuai jadwal sehingga menyebabkan penundaan rotasi kru, tambahan biaya akomodasi, serta peningkatan beban kerja bagi kru lama yang masih bertugas di kapal.

Fenomena keterlambatan dalam proses pergantian awak kapal merupakan isu penting yang memengaruhi kualitas dan kelancaran operasional kapal, terutama pada industri migas di laut. Keterlambatan ini tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan waktu, tetapi juga menyebabkan dampak yang lebih luas dalam operasional. (Andrianto et al., 2016) Ketidaktepatan jadwal pergantian awak bisa mengganggu rencana keberangkatan kapal, memperpanjang durasi waktu tunggu untuk logistik dan perekrutan personel, serta mengurangi pemenuhan standar layanan yang telah disepakati dengan *klien*.

Operasional *offshore*, awak kapal memiliki peran yang sangat penting karena kehadiran mereka langsung memengaruhi kesiapan kapal untuk menjalankan tugas utamanya (Sihombing & Hamdani, 2023). Setiap hambatan pada proses pergantian awak akan memengaruhi efektivitas kerja secara berantai. Penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam proses ini sering kali berasal dari faktor non-teknis, seperti masalah administrasi kesehatan, proses pemeriksaan

dokumen perjalanan, koordinasi transportasi, hingga ketidaksesuaian informasi jadwal rotasi antara operator dan awak kapal. Faktor-faktor ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara kebutuhan operasional kapal dengan ketersediaan awak di lapangan (Farah Adela, n.d.).

Keterlambatan pergantian awak juga memiliki konsekuensi ekonomi dan strategis bagi perusahaan. Penundaan keberangkatan kapal bisa meningkatkan biaya operasional karena waktu tunggu di pelabuhan, risiko dikenai denda karena tidak memenuhi jadwal layanan kepada klien, serta berpotensi merusak hubungan kontraktual. Selain itu, awak kapal yang terlambat diganti mungkin mengalami kelelahan karena bekerja terlalu lama, yang bisa menurunkan kinerja dan meningkatkan risiko kesalahan kerja atau kecelakaan di atas kapal.

Di sisi akademik, kajian mengenai *crew change* sebenarnya telah banyak dilakukan, namun sebagian besar penelitian berfokus pada aspek keselamatan kerja atau manajemen sumber daya manusia secara umum. Belum banyak penelitian yang menelaah secara spesifik hubungan antara hambatan administratif terutama keterlambatan *medpass* dengan kelancaran operasional kapal *crew boat* di wilayah *Offshore* Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan perspektif baru yang menggabungkan unsur manajemen SDM maritim, kesehatan kerja pelaut, dan efisiensi operasional kapal.

Selain itu, penelitian ini juga relevan dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 40 Tahun 2019 tentang pemeriksaan kesehatan pelaut, yang menegaskan bahwa setiap awak kapal wajib menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum bertugas. Regulasi ini pada dasarnya berorientasi pada peningkatan keselamatan pelaut, namun tanpa mekanisme koordinasi yang efisien antara perusahaan pelayaran, fasilitas kesehatan, dan instansi pelabuhan, regulasi justru dapat berpotensi menjadi hambatan operasional melalui keterlambatan penerbitan dokumen wajib (Ginting & Michael Evan Sihombing, 2025). Oleh karena itu, digitalisasi sistem pelaporan pemeriksaan kesehatan

menjadi esensial untuk menyelaraskan kepatuhan regulasi dengan efisiensi operasional di sektor maritim.

Hambatan dalam proses administrasi *Medical Pass* tidak hanya berdampak pada keterlambatan keberangkatan kapal (*delay*), namun juga memicu pembengkakan biaya operasional akibat biaya akomodasi tambahan bagi kru standby (Kurnia, n.d.). Lebih jauh lagi, keterlambatan *Crew change* berisiko pada keselamatan pelayaran kru yang seharusnya sudah selesai masa tugasnya terpaksa tetap bekerja di bawah kondisi kelelahan (*fatigue*), yang secara signifikan meningkatkan potensi human error di atas kapal.

Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Analisis Proses *Crew change* terhadap Kelancaran Operasional Kapal *Crew boat* di PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk Cabang Senipah” ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan proses *crew change* di lapangan, mengidentifikasi kendala yang terjadi, serta mengkaji bagaimana keterlambatan proses administratif seperti *Medpass* dapat memengaruhi kelancaran operasional kapal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan perencanaan rotasi kru, serta menjadi referensi ilmiah dalam bidang ketatalaksanaan angkutan laut dan kepelabuhanan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan proses *Crew change* pada *crew boat* di PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk?
2. Bagaimana dampak keterlambatan proses *Crew change* terhadap kelancaran operasional kapal di PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan secara rinci pelaksanaan proses *crew change* pada kapal *crew boat* di PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk Cabang Senipah.
2. Untuk menganalisis dampak keterlambatan proses *crew change* terhadap kelancaran operasional kapal di PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan, khususnya mengenai manajemen sumber daya manusia di kapal serta kaitannya dengan efektivitas operasional kapal *Offshore*.

Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji hubungan antara proses administrasi kesehatan pelaut MCU dan *Medpass* dengan kelancaran operasional di sektor pelayaran niaga maupun migas lepas pantai.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Memberikan rekomendasi strategis kepada manajemen PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk untuk meningkatkan sistem perencanaan rotasi kru dan manajemen dokumen kesehatan, sehingga pelaksanaan *crew change* dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu.

b. Bagi Instansi Pendidikan

Dapat menjadi bahan ajar, contoh studi kasus, dan materi pembelajaran bagi Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar terutama pada mata kuliah terkait operasional pelayaran, manajemen kru, dan transportasi laut *offshore*.

c. Bagi Penulis dan Taruna

Memberikan pengalaman nyata dalam penerapan ilmu manajemen operasional maritim, serta meningkatkan kemampuan analisis terhadap permasalahan administrasi dan operasional di perusahaan pelayaran.